

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Javier Trevino, *The Sociology of Law, Classical and Contemporary Perspectives*, Transaction Publishers, London, 2008
- Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- Atika Yuanita Paraswaty, *Parliamentary Brief : Series #8 Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam RKUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016
- Bagir Manan, et al., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011
- , *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009
- , *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009

- Dominikus Rato, dan Et Al. 2018. Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi, Jakarta, LKIS Pelangi Aksara
- Hamid Chalid, Freedom Of Religion In The Midst of Indonesia's Plural Society, The Review of Faith & International Affairs, 2018
- Hwian Christianto, Delik Agama: Konsep, Batasan dan Studi Kasus, Malang, MNC, 2013
- Hwian Christianto, Delik Agama: Konsep, Batasan dan Studi Kasus, Media Nusa Creative, Malang, 2018
- Indriyanto Seno Adji, Hukum Pidana (KUHP & KUHAP): Perkembangan dan Permasalahan, Jakarta Diadit Media, 2014
- Ismail Suny, Mencari Keadilan, cet.1, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Kittichaisaree, International Criminal Law, Oxford University Press, London, 2001
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), ed. Rev., Jakarta, Kanisius, 2007
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Mudzakkir, Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undangundang Pidana (Kuhp) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia), Kemenhukam, 2020
- Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta, UI-Press, 1995
- Natalie Goldstein, Global Issues: Religion ad the State, New York, Facts on File, Inc, 2010
- Oemar Seno Adji , Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Jakarta, Erlangga, 1981

Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati eds., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Ed. III. Cet. 2. Jakarta, Sekretariat Negara R.I., 1995

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht), Terjemahan dari P.A.F. Lamintang, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1992

Soedarto. Hukum Pidana I, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1988

Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Eresco, 1989

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2000

Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Jakarta, Gema Insani Press, 1996

## **B. Jurnal**

Benyamin Intan, Religious Violence and the Ministry of Religion: 'Public Religion' in the Pancasila-Based State of Indonesia, International Journal of Public Theology. Vol. 13 No 2, 2019,

Erfandi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.1 No.1, 2016

Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, 2011

- Fatmawati,” Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4, 2011
- Irwan Abdullah, Politik Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keragaman Budaya Indonesia, Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Vol. 5 No.2, 2003
- Ismansyah dan Ermawati B., “Permasalahan Delik Zina yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. IX No. 1 2012
- Mufatikhatul Farikhah. "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.3, 2018
- Muhammad Darwis, “ Penodaan Agama Wabah Terhadap Pluralitas Agama Di Indonesia Penerapan Delik Kuhp Dalam Kasus Penodaan Agama”, Jurnal Toleransi, Vol 2, No 2, 2010
- Muwaffiq Jufri, “Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, N. 2, 2017
- Nazar Nurdin, “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia”, International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din Vol 19 No 1, 2017
- Novita Dewi Masyithoh, Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagaman Di Indonesia, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, 2016
- Suharto Soewondo, “Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Yustitia, Vol. 2 No, 2013
- Wasino, Indonesia: From Pluralism To Multiculturalism, Paramita: Historical Studies Journal, Vol. 23 No 2, 2013
- Yudesman, “Kebebasan Beragama: Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, HAM, Dan Hukum Islam “, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum , Vol. 08 Desember 2012

### **C. Aturan Hukum**

UU No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

UU Nomor 1/PNPS/1965.

